

**ANALISIS DAMPAK COVID-19  
TERHADAP KONDISI SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN  
PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN WISATA KULINER MAROS**

*Analysis Of The Impact Of Covid-19  
On The Social Conditions And Welfare  
Of Street Vendors In Maros Culinary Tourism*

**SKRIPSI**

**RAHMA**

**E031171004**



**DEPARTEMEN SOSIOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2021**

**ANALISIS DAMPAK COVID-19  
TERHADAP KONDISI SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN  
PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN WISATA KULINER MAROS**

**SKRIPSI**

**RAHMA**

**E031171004**



**DEPARTEMEN SOSIOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : ANALISIS DAMPAK COVID-19 TERHADAP KONDISI  
SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN PEDAGANG KAKI  
LIMA DI KAWASAN WISATA KULINER MAROS

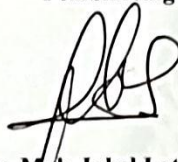
NAMA : RAHIMA

NIM : E031171004

Telah diperiksa dan disetujui oleh Pembimbing 1 dan Pembimbing 2  
Untuk diajukan pada panitia ujian skripsi  
Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

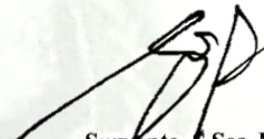
Menyetujui,

Pembimbing 1




Drs. Muh. Iqbal Latief, M.Si  
NIP. 19651016 199002 1 002

Pembimbing 2



Suryanto, S.Sos, M.Si  
NIK. 19840331 201904 3 001

Mengetahui,  
Departemen



Drs. Hasbi, M.Si, Ph.D  
NIP. 19630827 199103 1 003

**HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI**

Skripsi ini telah di uji dan di pertahankan di depan Tim Evaluasi Skripsi

Pada Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Hasanuddin

Oleh :

**NAMA** : **Rahma**

**NIM** : **E031171004**

**JUDUL** : **ANALISIS DAMPAK COVID-19 TERHADAP  
KONDISI SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN  
PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN WISATA  
KULINER MAROS**

Pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 04 Agustus 2021

Tempat : Ruang Ujian Departemen Sosiologi

**TIM EVALUASI SKRIPSI**

Ketua : Drs. Muhammad Iqbal Latief, M.Si (.....)

Sekretaris : Suryanto, S.Sos, M.Si (.....)

Anggota : Dr. Sakaria, S.Sos, M.Si (.....)

: Dr. Nuvida RAF, MA (.....)



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Rahma

NIM : E031171004

Jurusan : Sosiologi

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Kondisi Sosial Dan Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Wisata Kuliner Maros”, adalah asli hasil penelitian saya sendiri dan bukan hasil karya orang lain.

Makassar, 28 Juli 2021

Yang memberi pernyataan



Rahma  
E031171004

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Ibu merupakan kata tersejuk yang dilantunkan oleh bibir-bibir manusia. Dan “ibuku” merupakan sebutan terindah. Kata yang semerbak cinta dan impian, manis dan syahdu yang memancar dari kedalaman jiwa.*

*(Gibran)*

Alhamdulillah Puji Syukur penulis haturkan kepada ALLAH SWT yang telah memberikan kekuatan dan kemudahan penyusunan skripsi ini. Tanpa adanya kehendakMu semuanya tidak akan terjadi. Tidak lupa penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW atas limpahannya yang membawa kita dari alam kebodohan ke alam kecerdasan. Skripsi ini saya persembahkan kepada bapak saya, **Rais** dan ibu saya **Senga** yang telah membesarkan saya dan memberikan dukungan selama pengerjaan skripsi ini. Tidak lupa bagi penyemangat saya, saudara-saudaraku, keluargaku, terima kasih atas dukungan kalian.

Tidak lupa terima kasih kepada kakanda senior di Kemasos yang telah memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini. Dan teman-teman SOCIUS, karena kalian saya merasakan yang namanya perjuangan semangat jangan patah arang.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat melalui masa perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul “**Analisis Dampak Covid-19 terhadap Kondisi Sosial Dan Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Wisata Kuliner Maros**” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana pada jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Kepada **Drs. Muh. Iqbal Latief, M.Si** selaku pembimbing I, terima kasih atas kepercayaannya dan bimbingannya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dan **Suryanto, S.Sos, M.Si** selaku pembimbing II, terima kasih untuk setiap waktu yang diberikan tanpa lelah membimbing saya untuk menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih juga yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada:

1. Drs. Hasbi, M.Si, Ph.D selaku Ketua Departemen dan Dr. M. Ramli AT, M.Si selaku Sekretaris Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
2. Semua Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik penulis dalam pendidikan di Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik sehingga penulis bisa menyelesaikan studi dengan baik.
3. Seluruh staf Departemen Sosiologi yang telah memberikan bantuan kepada saya selama menjadi mahasiswa. Utamanya Pak Pasmudir, S.Hum,

M.Si serta Ibu Rosnaini, SE yang selalu menampakkan sikap yang bersahabat kala penulis berhadapan dengan masalah administratif dalam dunia akademik.

4. Kepada semua pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros, terutama seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif yang selalu membantu saya dalam kemudahan di Wisata Kuliner Maros.
5. Kepada keluarga besar saya yang tidak dapat saya jelaskan satu persatu yang selalu memberikan bantuan dan dukungan selama penulis menempuh studi.
6. Kepada saudara saya Lukman Rais yang telah mengerahkan seluruh tenaga dan pikirannya dalam membantu saya selama dalam proses penelitian, penyusunan skripsi dan sampai masa studi saya selesai. Terima kasih.
7. Kepada keluarga besar Kemasos FISIP Unhas yang telah menjadi rumah kedua penulis untuk belajar dan memahami segala hal. Terima kasih untuk setiap pengajaran dan kekeluargaan yang selama ini penulis dapatkan selama berorganisasi di Universitas Hasanuddin.
8. Kepada saudaraku Socius 17 selaku saudara seperjuangan dalam menempuh pendidikan di Jurusan Sosiologi FISIP Unhas. Terima kasih untuk persaudaraan serta segala bantuan dan kebersamaan selama proses perkuliahan maupun organisasi. Semoga tetap saling peduli dalam setiap keadaan dan menjadi saudara yang tak sedarah hingga kelak nanti.



9. Kepada kakanda alumni Kemasos FISIP Unhas yang telah memberikan ilmu maupun pengalaman yang kami dapatkan selama ini.
10. Kepada Silda teman seperjuangan penulis. Terima kasih atas segala bantuan dan kebersamaan selama ini.
11. Kepada sahabat penulis Mia,Mima,Mira,Pute,Ayu,Ira,Eni terima kasih karena selalu ada.
12. EXO. Terima kasih karena telah menjadi penghibur penulis dikala lelahnya menyusun skripsi.
13. Terima kasih kepada informan yang telah memberikan informasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada penulis selama proses penelitian hingga penulisan skripsi ini selesai.
14. Kepada Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Makassar, 29 Mei 2021

Rahma

## ABSTRAK

**Rahma, E031171004. “Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Kondisi Sosial dan Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima di Wisata Kuliner Maros” dibimbing oleh Muh. Iqbal Latief dan Suryanto.**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kondisi sosial pedagang kaki lima setelah pandemi covid-19 dan menggambarkan dampak covid-19 terhadap kesejahteraan pedagang kaki lima di Wisata Kuliner Maros.

Subjek dalam penelitian ini adalah pedagang kaki lima di Wisata Kuliner Maros sebanyak 6 (enam) orang dan 1 (satu) dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu berawal pada data dan bermuara pada kesimpulan. Tujuan penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat dari fenomena yang ada, atau hubungan antara fenomena yang diteliti tanpa adanya perlakuan khusus. Dasar penelitian menggunakan metode studi kasus yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisa suatu proses tertentu terkait fokus penelitian, sehingga dapat menemukan ruang lingkup tertentu.

Hasil penelitian menunjukkan kondisi sosial pedagang kaki lima setelah pandemi covid-19 sangat berubah akibat dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yaitu kurangnya pendapatan yang berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Pada hubungan sosial kuat disaat saling bekerja sama, saling mendukung satu sama lain sedangkan yang lemah ketika muncul persaingan yang tidak sehat, terjadi kecemburuan terhadap penerapan kebijakan yang tidak menyeluruh. Proses adaptasi terkait dengan jadwal buka dan tutup di kawasan wisata kuliner, yaitu terjadinya pengaturan penjualan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan proses integrasinya. Dampak sosial kebijakan penutupan dan pembatasan sosial adalah terbatasnya proses sosialisasi yang menciptakan masalah dan hubungan sosial bahkan menjadi persaingan dan pertentangan antar pedagang karena kebijakan tersebut. Dampak budaya tampak pada perubahan kebiasaan dari konvensional (tatap muka) menjadi online dengan kebijakan pesan antar. Dampak ekonomi adalah berkurangnya pendapatan dan semakin mempersempit ruang untuk bekerja di wisata kuliner karena tidak sanggup lagi untuk membuka sehingga terpaksa merumahkan karyawan atau menutup lapak PKL sehingga mencari alternatif pekerjaan lain seperti penjual sayur, online shop, dan tukang cukur.

Kata Kunci : Dampak Sosial, Covid 19, Kesejahteraan, Pedagang Kaki Lima

## ABSTRACT

**Rahma, E031171004. “The Analysis of the Impact of Covid-19 on The Social Conditions and Welfare of Street Vendors in Maros Culinary Tourism” Supervised by Muh. Iqbal Latief and Suryanto.**

The purpose of this study is to determine the social conditions of street vendors after the covid-19 pandemic and describe the impact of covid-19 on the welfare of street vendors in Maros Culinary Tourism.

The subjects in this study were the street vendors in Maros Culinary Tourism as many as 6 people and 1 from the Department of Culture and Tourism of Maros Regency. The research approach used was qualitative, which starts with the data and leads to conclusions. The purpose of the research used was descriptive, namely to make a systematic, factual and accurate description of the existing phenomena, or the relationship between the phenomena studied without any special treatment. The research base used was the case study method which aims to collect and analyze a certain process related to the research focus. Therefore, it can find a certain scope.

The results of the study showed that the social conditions of the street vendors after the COVID-19 pandemic have changed greatly as a result of policies made by the government, namely the lack of income that affects the fulfillment of daily needs. In strong social relations when working together, supporting each other, while weak when unhealthy competition arises, there is jealousy regarding the implementation of policies that are not comprehensive. The process of adaptation occurs related to the schedule of opening and closing in culinary tourism areas, that is the occurrence of sales arrangements issued by authorities and the integration process. The social impact of the closure and social restriction policies is the limited socialization process that creates problems and social relations even become competition and conflict between traders because of these policies. The impact of culture on changing habits is from conventional (face to face) to online with delivery policy. The economic impact is a condition of reduced income and narrowing the space to work in culinary tourism because they are no longer able to open so they are forced to lay off employees or close street vendors' stalls so they look for other alternative jobs such as vegetable sellers, online shops, and barbers.

Keywords : Social Impact, Covid 19, Welfare, Street Vendors

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	x
ABSTRACT .....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvi
DAFTAR ISTILAH .....	xvii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan .....	10
D. Manfaat.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Kajian Tentang Pedagang Kaki Lima.....	12
B. Kajian Tentang Dampak, Hubungan Sosial dan Kesejahteraan Sosial .....	13
C. Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons .....	21
D. Kerangka Konseptual .....	23

BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	26
A. Pendekatan penelitian .....	26
B. Tipe dan Dasar Penelitian .....	26
C. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	27
D. Sumber Data .....	28
E. Teknik Pengumpulan Data.....	29
F. Teknik Penentuan Informan .....	32
G. Teknik Analisis Data .....	34
BAB IV GAMBARAN UMUM DAN LOKASI.....	37
A. Sejarah Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Wisata Kuliner Maros .....	37
B. Sejarah Umum Kabupaten Maros.....	40
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	48
A. Karakteristik Informan .....	48
B. Pembahasan .....	54
a. Kondisi Sosial Pedagang Kaki Lima .....	54
b. Dampak Covid-19 Terhadap Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima .....	79
BAB VI PENUTUP .....	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran .....	92
DAFTAR PUSTAKA .....	93
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penentuan dan Jumlah Informan Penelitian .....	33
Tabel 2 Jumlah Pedagang Kaki Lima di Wisata Kuliner Maros Tahun 2021 .....	39
Tabel 3 Wilayah Kabupaten Maros Berdasarkan Kecamatan Tahun 2020 .....	42
Tabel 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 2020 .....	43
Tabel 5 Penduduk Berdasarkan Bekerja dan Tidak Bekerja 2020 .....	44
Tabel 6 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan Di Kabupaten Maros Tahun 2020 .....	45
Tabel 7 Jumlah Sarana dan Prasarana Kesehatan Di Kabupaten Maros Tahun 2020 .....	47
Tabel 8 Jumlah Fasilitas Sarana Peribadatan Kabupaten Maros Tahun 2020 .....	48
Tabel 9 Informasi Informan .....	53

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Konseptual .....	25
Gambar 2 Peta Wilayah Wisata Maros.....	37
Gambar 3 Peta Administrasi Kabupaten Maros.....	40



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Dokumentasi .....	98
Lampiran 2 Panduan Wawancara .....	104
Lampiran 3 Surat Permohonan Izin Melakukan Penelitian .....	107
Lampiran 4 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian .....	108
Lampiran 5 Transkrip Wawancara .....	109

## DAFTAR ISTILAH

PSBB	: Pembatasan Sosial Berskala Besar
<i>Lockdown</i>	: Penutupan akses di sebuah area, baik itu akses masuk maupun akses keluar.
<i>Pneumonia</i>	: Peradangan pada kantong udara (alveoli) di paru-paru akibat infeksi bakteri, virus atau jamur.
COVID-19	: Penyakit menular yang disebabkan oleh <i>virus severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS –COV-2)</i>
<i>Work From Home</i>	: Bekerja di rumah
PTB	: Pantai Tak Berombak/kawasan <i>Smart Culiner</i>
<i>Top Dow</i>	: Pendekatan dari atas ke bawah yang menggunakan pengambilan keputusan oleh pemerintah dan kemudian akan dikomunikasikan kepada rakyat
<i>Bottom Up</i>	: Pendekatan dari bawah ke atas yang menggunakan pengambilan kebijakan berdasarkan masukan dari rakyat dan kemudian disusun serta direalisasikan oleh pemerintah.
Intervensi Kolaboratif	: Intervensi yang dilakukan dalam bentuk kerja sama dengan tenaga kesehatan dengan tujuan untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya kembali masalah dengan menganalisis kondisi lingkungan internal maupun eksternal yang mengacu pada pencapaian tujuan.
UMKM	: Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Resesi Ekonomi	: Penurunan signifikan kegiatan ekonomi yang berlangsung berbulan-bulan.
Kontravensi	: Suatu bentuk hubungan sosial disosiatif yang

	terjadi dalam kehidupan yang bermasyarakat
<i>Flow Of Income</i>	: Perputaran arus uang, barang, dan jasa antar pelaku ekonomi
<i>Purchasing Of Power</i>	: Jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli dengan satuan mata uang
<i>Social Order</i>	: Sistem kemasyarakatan, hubungan dan kebiasaan yang berlangsung secara lancar demi mencapai sasaran kemasyarakatan
<i>Symbiosis Mutualisme</i>	: Hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan
<i>Coding</i>	: Proses pelabelan/memberikan label pada kata yang mewakili tema penting dan berulang
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
KOPUMDAG	: Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
<i>Culture Activity</i>	: Kegiatan kebudayaan yang dilakukan masyarakat setempat
<i>Social/Physical Distancing</i>	: Menjaga jarak secara fisik
<i>Take away</i>	: Dibawa pulang
<i>Stakeholder</i>	: Pemangku kepentingan
Dukcapil	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Wabah *pneumonia* baru yang bermula dari Wuhan, Provinsi Hubei, China yang bernama Covid-19 menyebar dengan cepat ke lebih dari 190 negara dan teritori pada awal 2020. Covid-19 mendorong terjadinya banyak perubahan yang telah melahirkan banyak norma dan praktik dalam tatanan sosial, politik, dan ekonomi; baik pada level individu, komunitas, kelembagaan, dan hubungan antarbangsa (Scharfstein & Gaurf, 2020).

Perkembangan krisis kesehatan yang berdampak pada ekonomi dunia ini praktis membuat seluruh negara di dunia harus mundur dengan rencana-rencana strategis yang telah ditetapkan semula untuk kemudian digantikan kebijakan tanggap darurat dengan memobilisasi semua sumber daya untuk mengatasi wabah Covid-19. Lembaga *think tank* dan pemikir strategis mengoreksi proyeksinya yang kemungkinan akan terjadi perlambatan, resesi, dan bahkan depresi ekonomi. Pembangunan di setiap negara dipastikan terganggu. Masing-masing negara merevisi APBN-nya dan menyediakan alokasi dana yang besar untuk mengatasi wabah corona ini. Mengingat bahwa penyakit yang datang melalui virus corona cukup mematikan (rata-rata sekitar 3-5% kematian dari korban yang telah terpapar virus), lalu obat paten belum ditemukan, maka hanya solusi pencegahan yang menjadi jalan terbaik untuk diupayakan agar masing-masing negara dapat melindungi setiap nyawa warganya(Scharfstein & Gaurf, 2020).

Indonesia tidak luput dari adanya Covid-19. Terhitung jumlah kematian akibat dari virus tersebut meningkat cukup signifikan. COVID-19 pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah dua kasus. Data 31 Maret 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi berjumlah 1.528 kasus dan 136 kasus kematian. 10 Tingkat mortalitas COVID-19 di Indonesia sebesar 8,9%, angka ini merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara (Scharfstein & Gaurf, 2020) sehingga pemerintah menerapkan kebijakan *Lockdown* sebagai upaya untuk membatasi penyebaran virus secara total. Namun, Indonesia sendiri memodifikasinya dengan nama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diberlakukan per wilayah, baik provinsi atau kabupaten/kota berdasarkan tingkat keparahan wabah yang penilaiannya ditentukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan (Muhyiddin, 2020).

Maros menjadi kabupaten/kota dengan jumlah kasus positif Covid-19 tertinggi ketiga di Sulawesi Selatan setelah Makassar dan Gowa. Pandemi *coronavirus* di maros pertama kali dikonfirmasi pada tanggal 27 Maret 2020. Menurut Kementerian Kesehatan, Maros telah ditetapkan sebagai salah satu transmisi lokal penularan Covid-19 di Indonesia. Transmisi lokal sendiri merujuk pada penularan Covid-19 antara orang perorang yang terjadi di suatu wilayah. Data pantauan pada bulan Desember 2020, Kabupaten Maros memiliki total suspek 398, dimana korban meninggal 5 orang, sementara konfirmasi positif 94 orang, dimana korban meninggal 16 orang (Tim Gugus Covid-19 Maros, 2020).

Krisis akibat pandemi COVID-19 telah membawa dilema mendalam tentang apa yang harus diutamakan: antara kesehatan warga atau menjaga aktivitas

ekonomi tetap berputar. Pandemi covid-19 menunjukkan bahwa ada kebutuhan esensial yang wajib dipenuhi agar manusia dapat tetap hidup, yaitu: makan, minum, kerja, istirahat, dan kesehatan. Prasyarat dasar kehidupan manusia itu yang menjadikan ancaman terhadap kesehatan kemudian berdampak pada terjadinya resesi ekonomi akibat berhentinya proses produksi dan turunnya tingkat konsumsi. Guncangan ekonomi ini dipicu ketakutan warga akan keselamatannya serta kebijakan isolasi yang diterapkan oleh pemerintah di beberapa tempat untuk melindungi warga dari ancaman virus corona.

Kebijakan *lockdown* dan isolasi diri secara efektif menghambat penyebaran virus corona (M, 2020), akan tetapi dampak lain yang timbul adalah banyaknya aktivitas kerja yang terpaksa berhenti. Bagi masyarakat yang memiliki tabungan cukup tetap dapat bekerja dengan *Work from Home* (WFH), mereka tetap mampu bertahan di tengah kebijakan *lockdown* dan isolasi diri. Situasi yang berbeda dialami oleh masyarakat dengan ekonomi menengah-bawah (warga rentan) yang tidak bisa menikmati kemewahan WFH dan tabungan yang dimiliki cenderung kecil atau bahkan tidak memiliki tabungan sama sekali. Bagi mereka “*tidak kerja, berarti tidak makan*”. Pada situasi seperti itu, kebijakan sosial pemerintah bisa saja didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan pokok warga rentan sehingga mereka tetap bisa bertahan walaupun tidak ada penghasilan (Muhyiddin, 2020).

Wisata kuliner maros merupakan suatu kawasan tempat berkumpulnya lapak pedagang kaki lima. Mereka dikumpulkan dalam satu kawasan luas di sepanjang Jalan Azalea, Jalan Topas, Jalan Bougenville yang secara administratif merupakan wilayah Lingkungan Kassi Lama, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale.

Kawasan itu sendiri sangat dekat dengan pusat pemerintahan dan pusat olahraga masyarakat. Perencanaan Wisata Kuliner Maros sesungguhnya merupakan ide penataan pedagang kaki lima di pasar lama maros yang menciptakan kemacetan dan akhirnya dipindahkan di tempat yang lebih luas yang sifatnya bongkar pasang. Wisata kuliner ini secara resmi dibuka pada 20 Maret 2013 oleh Bupati Hatta Rahman dan berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan masyarakat sekarang (*Peraturan Daerah (PERDA) Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros Tahun 2012-2032*, 2012).

Kawasan Wisata Kuliner Maros turut menerima dampak dari Covid-19 itu sendiri. Dengan melihat semakin bertambahnya pasien positif covid di Kabupaten Maros, sehingga Pemerintah mengambil langkah tegas untuk memutus rantai penyebaran virus covid dengan memutuskan menutup Kawasan Kuliner Maros pada tanggal 24 Maret – 01 April 2020 dan 13 April – 20 April 2020 . Sebelum penutupan, Pemerintah Kabupaten Maros juga menetapkan kebijakan pesanan *take away* atau bungkus pada para pedagang atau pemilik usaha di Kawasan Wisata tersebut dengan alasan pertimbangan ekonomi para pedagang. Pemerintah Kabupaten Maros juga melakukan pembatasan terhadap jam operasional pasar sampai jam 22.00 Wita (Arsyad, 2020).

Penutupan Wisata Kuliner Maros tentu menjadi hal yang sangat baik melihat *trend* peningkatan kasus COVID-19 yang tidak memiliki tanda-tanda penurunan. Pertarungan antara kesehatan dan ekonomi masyarakat menjadi hal yang tidak bisa dihindari. Hal tersebut menjadi dasar kebijakan penutupan wisata kuliner melihat intensitas penambahan korban yang terus meningkat.



Dampak pandemi covid-19 sangat terasa, utamanya para pedagang kaki lima di sekitaran Wisata Kuliner Maros. Pada awal pandemi terjadi penurunan *omset* pembeli karena pembatasan sosial yang dilakukan, dan semakin bertambah dengan kebijakan penutupan Wisata Kuliner Maros. Meskipun ada kelonggaran dengan kebijakan pembeli hanya boleh membungkus, tetapi ini tidak mengembalikan pendapatan sebelumnya.

Penutupan berakibat pada berkurangnya interaksi sosial antara pedagang dan pembeli yang menggantungkan dirinya dari aktivitas perdagangan di sekitar Wisata Kuliner Maros. Ada sebanyak 103 pedagang kaki lima yang menggantungkan dirinya dari keramaian dan aktivitas di wisata kuliner serta berdasarkan data Dinas Pariwisata Kabupaten Maros sekitar 20.000 pengunjung perhari sehingga akibat dari pemberlakuan peraturan pemerintah akan sangat berpotensi memicu konflik. Pengurangan dan penutupan akses ini bukan hanya berdampak pada sisi penurunan ekonomi dari pedagang, tetapi berakibat meningkatkan masalah sosial yang kemungkinan akan terjadi.

Selain hubungan pedagang dengan pemerintah, juga berdampak pada hubungan antara pedagang dan pembeli. Terjadinya jarak sosial di masa pandemi tidak bisa dipungkiri memicu beberapa asumsi-asumsi, seperti semakin terbatasnya interaksi sosial akibat kebijakan pembatasan sosial oleh Pemerintah. Perlu dipahami interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan sosial karena tanpa interaksi sosial, tak akan mungkin ada kehidupan bersama. Bertemunya orang-perorangan secara badaniah belaka tidak akan menghasilkan pergaulan hidup dalam suatu kelompok sosial. Pergaulan hidup semacam itu akan

terjadi apabila orang-orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia bekerja sama, saling berbicara dan seterusnya untuk mencapai suatu tujuan bersama, mengadakan persaingan, pertikaian, dan lain (Soekanto, 2015).

Aspek sosial lain yang perlu dicermati dari dampak kebijakan pembatasan sosial yang dilakukan pemerintah Kabupaten Maros adalah penurunan kesejahteraan sosial karena penutupan dan pembatasan waktu menjual dari pedagang. Perbedaan yang sangat tajam dapat dilihat dari pendapatan pedagang, yang berdasarkan observasi dan wawancara pada 15 Oktober 2020 sebesar Rp.1.000.000 – Rp.1.500.000,- per hari sebelum adanya pandemi. Tetapi dengan adanya Pandemi Covid-19, pendapatan menurun drastis menjadi Rp.500.000 – Rp.750.000/hari. Penurunan ini terjadi karena pembatasan aktivitas di sekitaran wisata kuliner, baik di sekitar Kolam PTB maupun di warung kopi maupun cafe.

Beberapa ahli yang telah melakukan penelitian yang menuliskan karya ilmiah pada aspek dampak sosial, kesejahteraan, masalah sosial, seperti Latief (Latief et al., 2021) dengan judul *“Collaboration in handling COVID-19 toward people in poverty line: study case in Makassar”*, kemudian Kurniasih (Kurniasih, 2020) yang menelaah *“Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Penurunan Kesejahteraan Masyarakat Kota Pontianak”*, kemudian Pakhpahan (Pakhpahan, 2020) dengan judul *“Covid-19 dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah”*, selain itu Purbawati (Purbawati et al., 2020) dengan judul *“Dampak Social Distancing Terhadap Kesejahteraan Pedagang Di Pasar Tradisional Kartasura Pada Era Pandemi Korona”*, selain itu Hanoatubun (Sihaloho, 2020) yang meneliti dengan judul *“Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia”*, Sakri (Sakri,

2020) mengenai “*Menakar Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Daerah*”.

Dari beberapa hasil karya tulis yang disebutkan diatas, terdapat temuan-temuan, seperti yang diungkapkan Latief (Latief et al., 2021) bahwa pemahaman masyarakat di garis kemiskinan yang terbatas tentang Covid-19 dan protokol kesehatan membuat perilaku mereka acuh tak acuh dan tidak patuh terhadap protokol kesehatan. Selain itu, pendekatan *top down* pemerintah untuk menangani pandemi covid-19 tidak efektif. Namun, pendekatan *bottom up* intervensi kolaboratif perlu dilakukan melalui pendekatan kelompok untuk mendapatkan pemahaman tentang protokol kesehatan covid-19, khususnya bagi masyarakat yang berada di garis kemiskinan dan kelompok rentan lainnya.

Sedangkan Kurniasih (Kurniasih, 2020) bahwa pendapatan mengalami penurunan tajam antara 30 persen sampai 70 persen di awal masa pandemic sementara pengeluaran cenderung tetap. Kondisi ini menyebabkannya harus mensiasati pengeluaran keluarga. Mereka hanya mengganti jenis lauk tertentu dan lebih memilih mencari sumber pendapatan lain untuk mempertahankan pola pengeluaran yang lama daripada merubah pola pengeluaran keluarga.

Kemudian hasil yang ditemukan oleh Pakhpahan (Pakhpahan, 2020) menunjukkan bahwa pandemi covid-19 memberikan implikasi negatif bagi perekonomian domestik seperti penurunan konsumsi dan daya beli masyarakat, penurunan kinerja perusahaan, ancaman pada sektor perbankan dan keuangan, serta eksistensi UMKM. Pada aspek konsumsi dan daya beli masyarakat, pandemi ini menyebabkan banyak tenaga kerja berkurang atau bahkan kehilangan

pendapatannya sehingga berpengaruh pada tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat.

Sedangkan hasil penelitian Purbawati (Purbawati et al., 2020) menunjukkan bahwa dampak yang ditimbulkan akibat adanya pembatasan sosial (*social distancing*) bagi pedagang di Pasar Tradisional Kartasura yakni pasar menjadi sepi, daya beli masyarakat menurun, dan distribusi bahan yang terhambat, lalu langkah-langkah yang diambil para pedagang di Pasar Tradisional Kartasura pada era pandemi corona yakni mengurangi jumlah dagangannya, menurunkan harga, dan beralih profesi.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Hanoatubun (Hanoatubun, 2020) bahwa terjadi kesusahan dalam mencari lapangan pekerjaan, susah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan juga tidak mempunyai penghasilan dalam memenuhi kebutuhan untuk sehari-hari dan juga banyak kesusahan yang diterima dari semua sektor perekonomian.

Sakri (Sakri, 2020) menunjukkan bahwa Dampak Pandemi Covid- yaitu kehilangan pekerjaan yang dampaknya menciptakan pengangguran, kurangnya akses terhadap pangan (*food insecurity*), perpindahan tempat tinggal yang terjadi selama pandemi.

Sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya karena kajian dalam penelitian ini adalah membahas mengenai kondisi dan masalah sosial pedagang serta dampak covid terhadap kesejahteraan sosial yang terdiri atas dampak sosial, dampak budaya dan dampak ekonomi. Selain itu juga membahas hubungan sosial antar pedagang, pembeli dan dinas

pariwisata. Akibat pandemi covid-19 adanya kerenggangan hubungan antara pedagang dengan pemerintah, ada ketegangan hubungan yang sangat jelas dimana ada penolakan dan protes yang dilakukan melihat pembatasan dan penutupan yang merugikan pedagang dan berdampak terhadap kerentanan sosial dan kesejahteraan sosial pedagang. Dan juga adaptasi dan integrasi sosial pedagang kaki lima dalam menghadapi kebijakan pembatasan sosial pasca pandemi. Penelitian ini juga menggunakan Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons.

Sehingga dalam penelitian ini akan memfokuskan pada bagaimana kondisi dan masalah sosial, bagaimana hubungan sosial, bagaimana proses adaptasi dan integrasi pemberlakuan pembatasan sosial dan penutupan di wisata kuliner, serta dampak yang terjadi akibat Covid-19 terhadap pedagang kaki lima, ada perbedaan tingkat kesejahteraan sosial pedagang sebelum dan setelah pemberlakuan penutupan serta pembatasan aktivitas sosial sehingga berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengangkat judul “**Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Kondisi Sosial dan Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima di Wisata Kuliner Maros**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang bahwa Covid-19 memberikan dampak sosial bagi pedagang kaki lima di Wisata Kuliner Maros. Berdasarkan hal tersebut dapat diberikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi sosial pedagang kaki lima setelah pandemi covid-19 di Kabupaten Maros?
2. Bagaimana Dampak Covid-19 terhadap Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima di Wisata Kuliner Maros ?

### **C. Tujuan**

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui kondisi sosial pedagang kaki lima setelah pandemi covid-19
2. Untuk mengetahui dampak Covid-19 terhadap kesejahteraan Pedagang Kaki Lima di Wisata Kuliner Maros.

### **D. Manfaat**

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis, sebagai sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian Ilmu Sosiologi
2. Manfaat Praktis, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi untuk memformulasikan kebijakan pemerintah daerah terkait kebijakan penutupan Wisata Kuliner Maros dan dampak sosialnya terhadap Pedagang Kaki Lima.
3. Manfaat metodologis, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu wacana tambahan referensi yang bermanfaat bagi pihak pihak yang melakukan telaah, kajian ilmu pengetahuan pada berbagai

disiplin ilmu yang terkait khususnya yang berhubungan tentang analisis dampak sosial Covid-19.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Tentang Pedagang Kaki Lima**

Pedagang Kaki Lima atau yang biasa disingkat dengan kata PKL adalah istilah untuk menyebut *penjaja* dagangan yang menggunakan gerobak. Secara “etimologi” atau bahasa, pedagang biasa diartikan sebagai jenis pekerjaan yang berkaitan dengan jual beli. Pedagang adalah orang yang bekerja dengan cara membeli suatu barang yang kemudian barang tersebut dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi sehingga mendapat keuntungan dari barang tersebut. Kaki lima diartikan sebagai lokasi berdagang yang tidak permanen atau tetap.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 10 /Per/M.Kukm/XII/2017 Bab I Pasal 1 ayat 1 tentang Pedoman Pelaksanaan Penataan Kawasan Pedagang Kaki Lima Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2018 bahwa :

“Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap. “ (*Peraturan Daerah (PERDA) Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima, 2006*).

Definisi Bromley seperti dikutip oleh (Effendi, 1988) mengatakan bahwa: ”Pedagang Kecil digambarkan sebagai perwujudan pengangguran tersembunyi atau setengah menganggur. Menurut gambaran yang paling buruk dipandang sebagai parasit dan sumber pelaku kejahatan. Sedangkan menurut pandangan yang paling baik PKL dipandang sebagai korban dari langkanya kesempatan kerja di

kota ada asumsi yang menyatakan bahwa istilah Pedagang Kecil diambil dari pengertian di tepi jalan yang lebarnya lima kaki (*lima feet*). Tempat ini umumnya terletak di trotoar, depan toko dan tepi jalan. Sedangkan istilah PKL berasal dari orang yang berdagang yang menggelarkan barang dagangannya, yang cukup menyediakan tempat darurat, seperti bangku-bangku yang biasanya berkaki empat, ditambah sepasang kaki pedagangnya sehingga berjumlah lima, sehingga dari asumsi tersebut timbul julukan PKL (Sari, 2016).

Terlepas dari hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha dengan maksud memperoleh penghasilan yang sah, dilakukan secara tidak tetap, dengan kemampuan terbatas, berlokasi di tempat atau pusat-pusat konsumen, dan pada umumnya tidak memiliki izin usaha.

## **B. Kajian Tentang Dampak, Hubungan Sosial dan Kesejahteraan Sosial**

### **a. Dampak Sosial**

Dampak sosial dimaknai sebagai dampak-dampak yang mencakup semua konsekuensi sosial dan budaya atas suatu kelompok manusia tertentu yang diakibatkan setiap tindakan publik atau swasta yang mengubah cara-cara bagaimana orang menjalani kehidupan, bekerja, bermain, berhubungan satu sama lain. Mengupayakan pemenuhan kebutuhan hidup mereka, dan secara umum berupaya menjadi anggota masyarakat yang layak. Tujuan utama dari penilaian dampak sosial adalah untuk mewujudkan suatu lingkungan biofisik dan kondisi manusia yang berkelanjutan dan layak (Firdausi, 2018).

Dampak sosial menurut Surto Haryono dalam (Dwi P., 2015) dampak dibagi menjadi dua yaitu dampak primer dan dampak sekunder. Dampak primer adalah dampak yang langsung dirasakan oleh suatu kegiatan. Sedangkan lebih jelasnya Douglas dkk menjelaskan tentang analisis kebijakan dengan beberapa indikator seperti, (1) perubahan sistem sosial, (2) nilai-nilai individu dan kolektif, (3) perilaku hubungan sosial, (4) gaya hidup dan ekspresi mode serta, (5) struktur masyarakat. Sedangkan Fardani (2012:6) menyatakan bahwa dampak sosial adalah sebuah bentuk akibat atau pengaruh yang terjadi karena adanya sesuatu hal. Pengaruh yang dimaksud adalah akibat yang terjadi pada masyarakat, baik karena suatu kejadian itu mempengaruhi masyarakat atau hal lainnya di dalam masyarakat (Agustina & Octaviani, 2017).

Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seseorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun negatif. Dampak dibagi menjadi dua yaitu dampak positif dan dampak negatif (Desi, 2017). Dampak positif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang baik. Sedangkan dampak negatif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu.

Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat juga menimbulkan dampak secara ekonomi, dampak ekonomi dijelaskan oleh Stynes dalam (Kusmayadi, 2013) dikelompokkan dalam tiga indikator, (1) *direct effect* meliputi penjualan, kesempatan kerja, pendapatan pajak, dan tingkat pendapatan, (2) *indirect effect*, meliputi perubahan tingkat harga, perubahan mutu dan jumlah barang dan jasa, perubahan dalam penyediaan properti dan variasi pajak, serta perubahan sosial dan lingkungan, (3) *induced effects*, yaitu pengeluaran rumah tangga, dan peningkatan pendapatan.

Selain itu dampak ekonomi juga dijelaskan oleh Cohen dalam (Dwi P., 2015) terdiri dari, (1) dampak terhadap pendapatan, (2) dampak terhadap aktivitas ekonomi, (3) dampak terhadap pengeluaran. Dari sini lebih diperjelas bahwa dampak ekonomi dijelaskan sebagai akibat dari suatu perubahan yang terjadi di lingkungan.

Kemudian selain ekonomi, perubahan sosial berdampak pada budaya. Dampak budaya yang dimaksud adalah sebuah gejala berubahnya struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Perubahan sosial budaya merupakan gejala umum yang terjadi sepanjang masa dalam setiap masyarakat. Perubahan itu terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang selalu ingin mengadakan perubahan.

Perubahan sosial budaya terjadi karena beberapa faktor. Di antaranya komunikasi; cara dan pola pikir masyarakat; faktor internal lain seperti perubahan jumlah penduduk, penemuan baru, terjadinya konflik atau revolusi;

dan faktor eksternal seperti bencana alam dan perubahan iklim, peperangan, dan pengaruh kebudayaan masyarakat lain (Lubis, 2018). Dampak covid-19 menjadi fokus dalam penelitian ini yang berakar pada penutupan dan pembatasan sosial di kawasan wisata kuliner yang berfokus pada kesejahteraan pedagang kaki lima.

#### **b. Hubungan Sosial**

Bentuk umum proses sosial adalah interaksi sosial (juga dinamakan proses sosial) karena interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Hubungan sosial atau interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-orang, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara perorangan dengan kelompok manusia (Gillin, 1954).

Berlangsungnya suatu proses interaksi didasarkan pada pelbagai faktor, antara lain faktor imitasi, sugesti, identifikasi dan simpati. Faktor-faktor tersebut dapat bergerak sendiri-sendiri secara terpisah maupun dalam keadaan tergabung. Apabila masing-masing ditinjau secara lebih mendalam, faktor imitasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses interaksi sosial. Salah satu segi positifnya adalah bahwa imitasi dapat mendorong seseorang mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku. Namun imitasi mungkin pula mengakibatkan terjadinya hal negatif misalnya peniruan terhadap tindakan-tindakan yang menyimpang.

Faktor sugesti berlangsung apabila seseorang memberi suatu pandangan atau suatu sikap yang berasal dari dirinya kemudian diterima oleh pihak lain.

Berlangsungnya sugesti dapat terjadi karena pihak yang menerima dilanda emosi yang menghambat daya berpikir secara rasional.

Identifikasi sebenarnya merupakan kecenderungan-kecenderungan atau keinginan-keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. Identifikasi sifatnya lebih mendalam daripada imitasi, karena kepribadian seseorang terbentuk atas dasar proses ini.

Proses simpati merupakan suatu proses dimana seseorang merasa tertarik pada pihak lain. Di dalam proses ini perasaan memegang peranan yang sangat penting, walaupun dorongan utama pada simpati adalah keinginan untuk memahami pihak lain dan untuk bekerja sama dengannya (Soekanto, 2005).

Selain itu, dalam (Soekanto, 2005) dijelaskan mengenai proses-proses interaksi yang pokok yaitu proses asosiatif dan proses disosiatif. Proses disosiatif dapat berupa kerja sama yaitu sebagai usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Kemudian akomodasi yaitu menunjuk pada suatu keadaan, berarti adanya suatu keseimbangan (*equilibrium*) dalam interaksi antara orang-perorangan atau kelompok-kelompok manusia dalam kaitannya dengan norma-norma sosial dan nilai-nilai sosial yang berlaku di dalam masyarakat.

Dalam proses disosiatif, berupa persaingan yang dapat diartikan sebagai suatu proses sosial dimana individu atau kelompok-kelompok manusia yang bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan yang pada suatu masa tertentu menjadi pusat perhatian umum (baik perseorangan maupun kelompok manusia) dengan cara menarik perhatian publik atau dengan

mempertajam prasangka yang telah ada tanpa mempergunakan ancaman atau kekerasan. Kemudian kontravensi pada hakikatnya merupakan suatu bentuk proses sosial yang berada antara persaingan dan pertentangan atau pertikaian. Dalam bentuknya yang murni, kontravensi merupakan sikap mental yang tersembunyi terhadap orang-orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Sikap tersebut dapat berubah menjadi kebencian, tetapi tidak sampai menjadi pertentangan atau pertikaian.

### **c. Kesejahteraan Sosial**

Secara konseptual, kesejahteraan sosial memiliki berbagai makna yang relatif berbeda, meskipun demikian substansi di dalam pengertian-pengertian itu pada dasarnya sama. Menurut Midgley dalam (Suradi, 2007) kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan atau kondisi kehidupan manusia yang tercipta ketika berbagai permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik; ketika kebutuhan manusia dapat terpenuhi dan ketika kesempatan sosial dapat dimaksimalisasikan. Pengertian ini menempatkan kesejahteraan sosial sebagai tujuan dari kegiatan pembangunan.

Kesejahteraan adalah kepuasan yang diperoleh individu dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang didapatkan. Tetapi tingkatan dari kesejahteraan itu merupakan sesuatu yang bersifat relatif karena tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan. Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi masyarakat yang berarti bahwa telah berada pada kondisi yang sejahtera. Pengertian sejahtera itu sendiri adalah kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam



keadaan sehat, dan damai, sehingga untuk mencapai kondisi itu orang tersebut memerlukan suatu usaha sesuai kemampuan yang dimilikinya. Para ahli ekonomi melihat kesejahteraan sebagai indikasi dari pendapatan individu (*flow of income*) dan daya beli (*purchasing of power*) masyarakat (Rambe, 2004).

Kesejahteraan menurut (Midgley, 2005) memiliki tiga elemen yakni: (1) sejauh mana masalah – masalah sosial ini diatur, (2) sejauh mana kebutuhan – kebutuhan dapat terpenuhi, (3) sejauh mana kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup dapat disediakan. Ketiga elemen tersebut berlaku bagi individu, keluarga, kelompok, komunitas bahkan seluruh elemen masyarakat. Jadi seseorang dapat dikatakan sejahtera atau suatu masyarakat dapat mewujudkan kesejahteraan sosialnya apabila ketiga elemen ini bisa terpenuhi dengan baik.

Dalam Undang-Undang Dasar Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 tentang Kesejahteraan Sosial menyebutkan, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial*, 2009).

Elizabeth Wickenden dalam (Friedlander, Walter & Rober, 1974) mendefinisikan kesejahteraan sosial, sebagai *a system of laws, programs, benefits, and service which strengthen or assure provision for meeting social needs recognized as basic for welfare of the population and for functioning of the social order*”(suatu sistem perundang-undangan, kebijakan, program, pelayanan, dan bantuan; untuk menjamin pemenuhan kebutuhan sosial yang

dikenal sebagai kebutuhan dasar bagi kesejahteraan manusia dan bagi fungsinya ketertiban sosial secara lebih baik). Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa:

1. Konsep 'Kesejahteraan Sosial' berbeda dengan 'Kesejahteraan'. Terpenuhinya kebutuhan sosial (kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan) menjadi dasar bagi terciptanya 'Kesejahteraan' (sebagai keadaan yang baik dalam semua aspek kehidupan manusia).
2. Pada tingkat masyarakat, kesejahteraan sosial berarti terdapatnya ketertiban sosial (*social order*) yang lebih baik.

Adapun menurut (HS, 2012) kesejahteraan hidup masyarakat dipahami sebagai kesejahteraan sosial. Terdapat beberapa indikator peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, di antaranya adalah (1) adanya kenaikan penghasilan secara kuantitatif; (2) adanya kesehatan keluarga yang lebih baik secara kualitatif; dan (3) adanya investasi ekonomis keluarga berupa tabungan.

Di Indonesia kesejahteraan sosial sering dipandang sebagai tujuan atau kondisi kehidupan yang sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan pokok manusia (Suharto, n.d.). Meskipun tidak ada suatu batasan substansi yang tegas tentang kesejahteraan, namun tingkat kesejahteraan mencakup pangan, pendidikan, kesehatan, dan seringkali diperluas kepada perlindungan sosial lainnya seperti kesempatan kerja, perlindungan hari tua, keterbebasan dari kemiskinan, dan sebagainya. Indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada sepuluh, yaitu umur, jumlah tanggungan, pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat

tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan dan kemudahan mendapatkan fasilitas.

### **C. Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons**

Talcott Parsons dalam karya-karya teoritisnya dikenal dengan teorinya struktural fungsionalisme yang didalamnya banyak membicarakan tentang keteraturan sosial (Yuashida, 2014).

Fungsionalisme struktural adalah sebuah sudut pandang luas dalam sosiologi dan antropologi yang berupaya menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian-bagian yang saling berhubungan. Fungsionalisme menafsirkan masyarakat secara keseluruhan dalam hal fungsi dari elemen-elemen konstituenya; terutama norma, adat, tradisi dan institusi (Kinloch, 2009).

Ritzer (2010:408) mengemukakan suatu fungsi adalah “suatu kompleks kegiatan-kegiatan yang diarahkan kepada pemenuhan suatu kebutuhan atau kebutuhan-kebutuhan sistem itu”.

Asumsi dasar yang digunakan dalam teori struktural fungsional dapat dipahami dari apa yang dijelaskan Ralf Dahrendorf, sebagaimana dipaparkan oleh (Damsar, 2017) sebagai berikut:

1. Setiap masyarakat terdiri dari berbagai elemen yang terstruktur secara relatif mantap dan stabil. Kegiatan setiap individu yang dilakukan secara setiap hari, melakukan fungsi masing-masing dan saling berinteraksi di antara mereka, selalu dilakukan setiap hari, relatif sama dan hampir tidak berubah.

2. Elemen-elemen terstruktur tersebut terintegrasi dengan baik. Elemen-elemen yang membentuk struktur memiliki kaitan dan jalinan yang bersifat saling mendukung dan saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya.
3. Setiap elemen dalam struktur memiliki fungsi, yaitu memberikan sumbangan pada bertahannya struktur itu sebagai suatu sistem. Semua elemen masyarakat yang ada memiliki fungsi. Fungsi tersebut memberikan sumbangan bagi bertahannya suatu struktur sebagai suatu sistem.
4. Setiap struktur yang fungsional dilandaskan pada suatu konsensus nilai diantara para anggotanya. Konsensus nilai tersebut baik dari kesepakatan yang telah ada dalam suatu masyarakat seperti adat kebiasaan,, tata perilaku, dan sebagainya yang dibuat aru.

Parsons percaya bahwa ada empat imperatif fungsional yang perlu (khas pada) semua sistem yaitu *adaptation* (A) (Adaptasi), *goal attainment* (G) (Pencapaian Tujuan), *integration* (I) (Integrasi), dan *latency* (L) (Latensi), atau pemeliharaan pola. Secara bersama-sama, keempat imperatif fungsional itu dikenal sebagai skema AGIL. Agar dapat lestari, sistem harus melaksanakan keempat fungsi tersebut.

1. *Adaptasi* : suatu sistem harus mengatasi kebutuhan mendesak yang bersifat situasional eksternal. Sistem itu harus beradaptasi dengan lingkungannya dan mengadaptasikan lingkungan dengan kebutuhan-kebutuhannya.
2. *Pencapaian tujuan* : suatu sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya.

3. *Integrasi* : suatu sistem harus mengatur antar hubungan bagian-bagian dari komponennya. Ia juga harus mengelola hubungan diantara tiga imperatif fungsional lainnya (A,G,L).
4. *Latensi (pemeliharaan pola)* : suatu sistem harus menyediakan, memelihara, dan memperbarui baik motivasi para individu maupun pola-pola budaya yang menciptakan dan menopang motivasi itu.

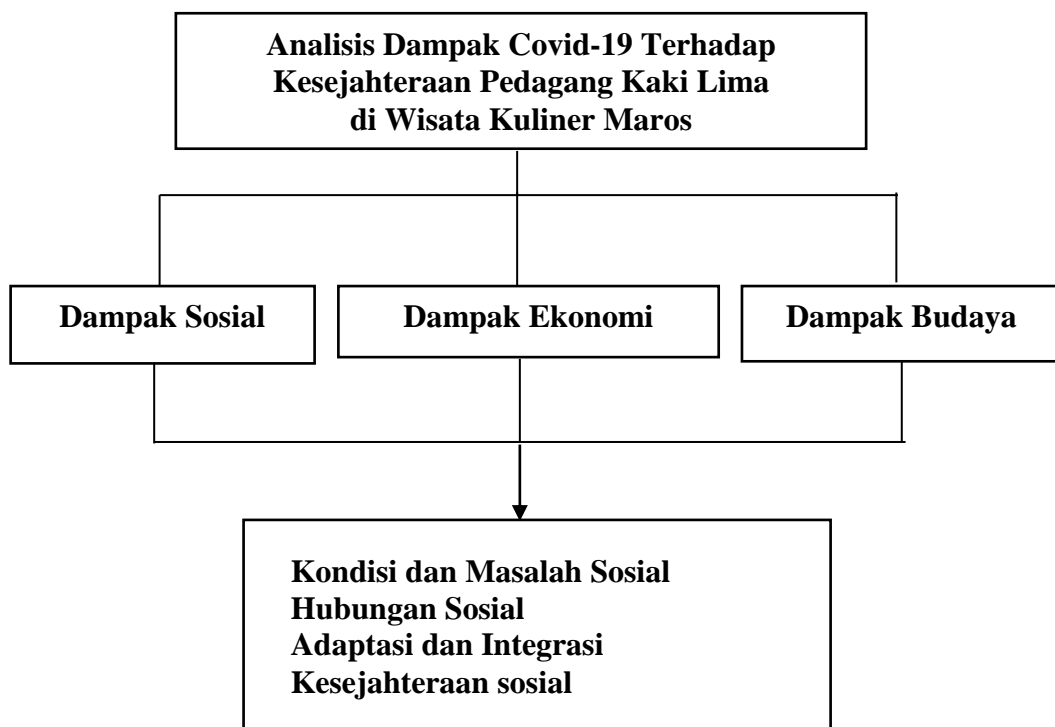
Parsons merancang skema AGIL untuk digunakan pada semua level di dalam sistem teoritisnya. Organisme behavioral adalah sistem tindakan yang menangani fungsi adaptasi dengan menyesuaikan diri dan mentransformasi dunia eksternal. Sistem kepribadian melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan mendefinisikan tujuan-tujuan sistem dan mobilisasi sumber-sumber daya untuk mencapainya. Sistem sosial menangani fungsi integrasi dengan mengendalikan bagian-bagian komponennya. Terakhir sistem budaya melaksanakan fungsi latensi dengan menyediakan norma-norma dan nilai-nilai bagi peran aktor yang memotivasi mereka untuk bertindak (Ritzer, 2012).

#### **D. Kerangka Konseptual**

Covid-19 di Kabupaten Maros mendorong terjadinya banyak perubahan dalam masyarakat. Karena hal tersebut sehingga diterapkannya pembatasan sosial dan penutupan kegiatan di Kabupaten Maros. Penutupan dan pembatasan aktivitas Pedagang Kaki Lima di Wisata Kuliner Maros dilaksanakan pada tanggal 24 Maret – 01 April 2020 dan 13 April – 20 April 2020. Pemerintah Kabupaten Maros juga melakukan pembatasan terhadap jam operasional pasar sampai jam 22.00 Wita.

Penutupan Wisata Kuliner Maros tentu menjadi hal yang sangat baik melihat *trend* peningkatan kasus COVID-19 yang tidak memiliki tanda-tanda penurunan. Hal tersebut menjadi dasar kebijakan penutupan wisata kuliner melihat intensitas penambahan korban yang terus meningkat. Konsekuensi penutupan dan pembatasan kegiatan di Wisata Kuliner Maros adalah menurunnya kesejahteraan sosial karena menurunnya pendapatan pedagang. Disamping itu juga kebijakan ini berakibat kerentanan sosial karena menurunnya kesejahteraan dapat menciptakan masalah sosial.

Wisata Kuliner Maros bukan hanya dilihat pada aspek ekonomi semata, tetapi merupakan wujud interaksi sosial yang skalanya besar di Kabupaten Maros. Di wilayah ini tercipta interaksi yang *intens* dan akibat kebijakan ini akan berakibat kerenggangan sosial dan menurunkan intensitas hubungan sosial. Ada hubungan yang dijaga dan membentuk *simbiosis mutualisme* dalam Kawasan Wisata Kuliner Maros, yang tentunya pedagang kaki lima menjadikannya modal sosial. Sehingga ada dampak yang terjadi akibat pembatasan dan penutupan ini. Pada penelitian ini dampak yang akan dikaji adalah dampak sosial, dampak ekonomi dan dampak budaya. Sehingga kerangka konseptual dapat digambarkan sebagai berikut :



*Gambar 1 Kerangka Konseptual*